



Tirani Meritokrasi dan Reimajinasi Solidaritas: Sebuah Kajian Berdasarkan Perspektif Michael Sandel

Petrus Tan

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Pos-el: pertertan631@gmail.com

Diajukan: 13 Januari 2023; **Direview:** 27 April 2023; **Diterima:** 02 Mei 2023; **Dipublis:** 22 Juni 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.332.1-19>

Abstract:

This article presents Michael Sandel's concept on the tyranny of meritocracy and reimagining of solidarity and its relevance in Indonesia. Meritocracy is a kind of ideology that believes that those who are successful deserve to breathe their success to their heart's content, while for those who fail, there is no one to blame but themselves. Sandel's view is that this logic makes meritocracy undermines togetherness and solidarity as the ethical foundation of democracy. The more we think that our success is our own effort, and the poor people's failure as their own fault, it is harder for us to imagine ourselves in someone else's shoes. Meritocracy makes liberal society accepts as fair the hierarchy between the rich and the poor, the smart and the stupid, or the successful and the unsuccessful. This belief generates arrogance for the winners and contempt for the losers. For Sandel, Trump's populism in the US is a form of rebellion against the tyranny of meritocracy. To counter the tyranny of meritocracy and cultivate the imagination of solidarity, we should propose the idea of humility as a public virtue. Humility is an acknowledgment that all our talents, achievements, and success are not the results of our own efforts but rather it depends on the resources of the community and society that accepts these talents and abilities.

Keywords: Meritocracy, Solidarity, Liberalism, Community, Humility.

Pendahuluan

Ide-ide yang membentuk masyarakat Barat 250 tahun lalu saat ini sedang goyah. Demokrasi merosot. Liberalisme sedang bergulat. Kapitalisme kehilangan kilau. Tetapi ada satu gagasan yang tetap mengundang antusiasme luas yaitu bahwa posisi individu dalam masyarakat bergantung pada prestasi dan kerja kerasnya. Gagasan itu disebut meritokrasi. Di tengah kebangkrutan aneka ideologi, meritokrasi tetap diterima sebagai ideologi universal.

Dalam sejarah, meritokrasi adalah ide revolusioner. Ide ini adalah jantung revolusi di Prancis, Inggris, Amerika dan revolusi di mana saja yang membentuk dunia modern. Ide meritokrasi pada hakikatnya muncul dari masyarakat bawah yaitu kelas yang frustrasi dengan elitisme *homo hierarchicus* dalam sistem feodalisme dan aristokrasi. Selama ribuan tahun masyarakat diatur menurut hierarki rasial, status sosial, jenis kelamin dan agama. Mobilitas ke atas tidak saja tak dianjurkan tetapi juga dilarang. Meritokrasi sebaliknya memandang hierarki semacam itu sebagai hal tercela yang bertentangan dengan gagasan bahwa setiap individu adalah tuan atas nasibnya sendiri. Berdasarkan konsep tentang diri otonom

dan bebas, meritokrasi menuntut agar posisi-posisi strategis dalam masyarakat harus diperoleh melalui kompetisi terbuka. Meritokrasi, karena itu, dianggap menopang demokrasi.¹

Namun, benarkah demikian? Jika meritokrasi menopang demokrasi, dan demokrasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesetaraan yang lebih besar, mengapa masyarakat liberal yang dipandang mampu mengatasi hambatan ras, agama dan gender justru melanggengkan berbagai ketimpangan, bahkan menganggap ketimpangan tersebut *fair*? Di negara-negara Barat misalnya, orang-orang diajari untuk membenci gagasan hierarki rasial. Mereka menolak rasisme dan hukum-hukum yang memisahkan lingkungan pergaulan orang kulit putih dan hitam. Mereka memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada saat yang sama, mereka juga beranggapan bahwa adalah pantas orang kaya hidup di lingkungan eksklusif yang lebih mewah, sekolah di sekolah-sekolah top, dan dirawat di rumah sakit tersendiri yang fasilitasnya lebih lengkap. Jika meritokrasi adalah ide kesetaraan, mengapa ketimpangan dan moral congkak yang menyertainya semakin berkembang dan membuat kita terpolarisasi?

Artikel ini hendak mendiskusikan pemikiran Michael Sandel (1953) dalam hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan tersebut. Dalam bukunya, *The Tyranny of Merit* (2020), Sandel melakukan kritik fundamental terhadap tirani meritokrasi. Menurutnya, selama empat dekade globalisasi pasar bebas, jurang antara *winner* (pemenang) dan *losers* (pecundang) semakin tajam. Klaim-klaim meritokratis meracuni demokrasi dan membuat kita terpolarisasi. Di satu sisi, ini terkait dengan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang terus tumbuh dalam masyarakat pasar kompetitif. Di sisi lain, klaim meritokratis merusak kohesi sosial dan solidaritas terutama karena keyakinan bahwa para pemenang pantas menghirup harum sukses mereka sepuas-puasnya, dan bagi yang gagal dan miskin, tak ada yang perlu disalahkan selain diri mereka sendiri.² Maka, dalam artikel ini, penulis berpandangan bahwa untuk menangkal bahaya meritokrasi bagi demokrasi dan menumbuhkan kembali solidaritas, kita perlu mengubah keyakinan moral dan cara pandang terhadap kesuksesan dan kegagalan.

Artikel ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama akan menguraikan kritik Sandel terhadap liberalisme. Bagian kedua akan menerangkan konsep meritokrasi. Bagian ketiga akan menjelaskan gagasan meritokrasi sebagai ideologi. Bagian keempat akan menguraikan gagasan reimajinasi solidaritas. Bagian kelima membicarakan implikasi pemikiran Sandel di Indonesia. Artikel ini akan ditutup dengan sebuah kesimpulan.

Kritik atas Liberalisme

Sejak akhir abad ke-19, istilah meritokrasi menggambarkan sebuah masyarakat liberal yang memegang prinsip peluang yang *fair* bagi semua orang. Secara filosofis, prinsip persamaan peluang yang *fair* terdapat dalam gagasan keadilan Rawls di abad ke-20. Dengan prinsip ini, meritokrasi tidak mengasumsikan siapa yang pantas mendapatkan posisi lebih tinggi dalam hidup tetapi hanya memastikan bahwa pilihan terbaik adalah setiap orang memiliki peluang setara untuk bersaing. Dari sudut pandang demokrasi sebagai ideal kesetaraan, meritokrasi dapat mereproduksi ketimpangan sosial ketika prinsip peluang yang *fair* tidak memperhitungkan ketidaksetaraan ekonomi dan perbedaan kelas-kelas sosial. Sisi negatif meritokrasi bagi demokrasi ini turut memperlihatkan kelemahan liberalisme prosedural.

¹ Alan Wooldridge, *The Aritocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World* (USA: Penguin Books, 2021)10-12.

² Michael Sandel, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* (USA: Farrar, Straus and Giroux, 2020) 12.

Dengan alasan itu, kita perlu menguraikan kritik Sandel terhadap liberalisme terlebih dahulu sebagai titik tolak memahami kritiknya terhadap tirani meritokrasi. Sandel adalah seorang filsuf politik kontemporer yang tenar. Majalah *China Newsweek* bahkan pernah menyebutnya sebagai “tokoh asing paling berpengaruh.”³ Dalam diskursus filsafat politik, Sandel dianggap telah berjasa memperdalam pandangan-pandangan komunitarian dalam perdebatan dengan liberalisme. Sandel sendiri menolak disebut komunitarian sebab di banyak tempat, komunitarian berarti menerima nilai-nilai tradisi dan hierarki secara tidak kritis. Sejauh komunitarianisme adalah nama lain mayoritarianisme atau gagasan bahwa hak-hak harus didasarkan pada nilai-nilai suatu komunitas yang diwariskan dari masa tertentu, Sandel dengan tegas menolaknya.⁴ Namun, Sandel menerima arti lain istilah komunitarian yang menjadi isi argumen filsafat politiknya yaitu kritik terhadap konsep diri liberal dan eksek individualisme, atau kritik terhadap visi *laissez-faire* kapitalisme pasar.⁵ Jika kita menyebut Sandel komunitarian, pengertian terakhirlah yang dimaksud.

Kritik Sandel terhadap liberalisme bertolak dari keprihatinannya terhadap dua persoalan utama yang mengisi jantung kekecewaan publik terhadap demokrasi di Amerika Serikat (AS). Pertama, ketakutan bahwa secara individual dan kolektif, warga negara kehilangan kontrol atas sejumlah kekuatan yang mengarahkan secara esensial kehidupan mereka. Kekuatan yang dimaksud adalah komitmen moral pada kebaikan bersama dan solidaritas kolektif yang semakin terkikis di bawah dominasi politik liberal dan ekspansi globalisasi tanpa batas. Kedua, sebagai akibat privatisasi konsep hidup baik yang diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan liberal yang bersifat netral, pabrik moral komunitas atau tatanan moral dalam keluarga, agama hingga negara-bangsa terurai dan hancur. Sandel berpendapat, dua kecemasan ini -lenyapnya *self-government* dan erosi komunitas - melahirkan krisis demokrasi.⁶ Dua persoalan tersebut menandai kegagalan politik liberal. Di satu sisi, semakin banyak orang yang menganggap bahwa negara terlalu mengganggu prospek hidup individual. Di sisi lain, negara tampaknya tidak berdaya dan tidak dapat secara efektif mengontrol krisis ekonomi domestik untuk menanggapi penyakit sosial yang terus berlanjut.⁷

Munculnya dua kecemasan tersebut terjalin erat dengan ideologi yang diyakini sebagai filsafat publik masyarakat liberal, yaitu liberalisme, terutama liberalisme prosedural Rawls. Dalam *A Theory of Justice* (1971), dengan merujuk pada Kant, tesis utama Rawls ialah bahwa etika politik tidak dapat berpijak pada konsep kebahagiaan atau hidup baik.⁸ Alasannya konsep hidup baik bersifat partikular, kebetulan dan tak dapat diberi pendasaran universal. Kita mustahil sepakat tentang satu versi kebahagiaan atau tujuan akhir di antara berbagai cara orang hidup bahagia. Tugas politik menurut Rawls bukan

³E. Osnos, “China’s Encounter with Michael Sandel,” *Encountering China. Michael Sandel and Chinese Philosophy*, ed. M. Sandel and Paul J. D’Ambrosio (Massachusetts: Harvard University Press, 2018) vii.

⁴Michael Sandel, *Liberalism and The Limit of Justice*, Second Edition (USA: Cambridge University Press, 1998) ix-x.

⁵Michael Sandel, “A New Politics of the Common Good,” (19 Agustus 2012). <http://asanints.org> (diunduh 28 September 2021).

⁶Michael Sandel, *Democracy’s Discontent* (Massachusetts: Harvard University Press, 1996) 3.

⁷Michael Sandel, “The Procedural Republic and The Unencumbered Self,” *Political Theory*, Vol. 12, No. 1 (1984) 92.<http://links.jstor.org/sici?sici=00905917%28198402%2912%3A1%3C81%3ATPRATU%3E2.0.CO%3B2-X>.

⁸Otto Gusti Madung, “Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel,” *Jurnal Ledalero*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2020) 130. DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.212.127-144>.

menentukan model kebahagiaan dan tujuan akhir yang harus dicapai warga negara melainkan hanya memberikan aturan main agar kebebasan yang satu tidak memangsa kebebasan yang lain.

Bagi Sandel, keutamaan keadilan menurut Rawls menggambarkan tidak hanya prioritas moral tetapi juga sebagai bentuk justifikasi yang istimewa bahwa hak mendahului kebaikan, tidak hanya dalam klaimnya tetapi juga karena prinsip-prinsipnya diturunkan secara independen. Masyarakat yang adil tidak berupaya mempromosikan tujuan tertentu tetapi memungkinkan warganya mengejar tujuan mereka sendiri, konsisten dengan kebebasan yang sama untuk semua. Karena itu, masyarakat harus diatur oleh prinsip-prinsip yang tidak mengandaikan konsep tertentu tentang kebaikan. Dalam paradigma liberal, suatu masyarakat disebut adil jika membiarkan setiap orang memilih tujuannya sendiri. Di sini, sebagaimana hak mendahului kebaikan, demikian subjek mendahului tujuan-tujuan.⁹ Subjek mendahului tujuan berarti individu tidak terikat dengan *telos* komunitas dan hanya mengejar tujuan individual.

Sandel menyebut individu yang kehilangan ikatan moral dengan dunia bersama tersebut sebagai *unencumbered self*. *Unencumbered self* adalah diri yang melayang-layang dalam ruang-ruang kebebasan, tak terbebani nilai-nilai komunitas, atribut sosial, tujuan formatif, dan kalkulus kepentingan sosial.¹⁰ *Unencumbered self* bukan makhluk egois dan jahat, melainkan individu yang asing, sepi dan tercerabut dari dunia bersama. Dalam paradigma liberal, hak-hak individu dijamin negara, dan hak-hak tersebut tak tunduk pada kalkulus kepentingan bersama, melainkan berfungsi sebagai kartu truf bagi individu dalam mengejar apa yang dianggapnya baik.

Implikasi politis pandangan tersebut ialah kita kehilangan filsafat publik yang merumuskan diskursus publik yang kuat secara moral. Jika tunduk di bawah logika liberalisme, konsep tentang tujuan bersama mesti diganti oleh konsep prosedur yang *fair*. Hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa pada akhir abad ke-20, di AS dan Eropa, filsafat publik yang merumuskan tujuan bersama dengan diskursus moral yang kuat digeser oleh konsep politik atau keadilan prosedural yang *fair*. Terjadi pergeseran dari politik kebaikan kepada politik hak, dari republik nasional kepada republik prosedural.¹¹ Pergeseran ini memberi arti bahwa negara atau komunitas politik semata-mata sebuah prosedur untuk mengamankan kepentingan individu.

Gagasan *unencumbered self* mendorong polarisasi sosial dan krisis solidaritas sebab dalam gagasan itu terkandung pesan bahwa apa yang memisahkan kita sebagai individu lebih kuat daripada apa yang menyatukan kita sebagai warga negara.¹² Dengan kata lain, di bawah desakan emansipasi individu liberal, kita kehilangan nilai-nilai bersama dan komitmen moral pada *welfare state*. Semakin kita memandang individu mandiri dan cukup diri, semakin kecil kemungkinan kita peduli dan solider kepada mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita sendiri. Bukan kebetulan bahwa seiring meningkatnya keyakinan liberal akan otonomi individu, meningkat pula keyakinan meritokratis akan kesuksesan dan kegagalan individu.

Meritokrasi sebagai Ideologi

⁹ *Ibid.*, 7.

¹⁰ Sandel, "The Procedural Republic," *op.cit.*, 86.

¹¹ *Ibid.*, 93.

¹² Stuart Rosenbaum, *Race, Justice and American Intellectual Traditions* (USA: Palgrave Pivot, 2018) 75. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76198-5_8.

Kritik terhadap meritokrasi pertama kali dilakukan oleh sosiolog Inggris, Michael Young, dalam karyanya, *The Rise of Meritocracy 1870-2033* (1958). Young memperkenalkan istilah meritokrasi yang dipahaminya sebagai suatu keyakinan bahwa prestasi individual seseorang merupakan ujung tombak demokrasi dan kemajuan sosial.

Dalam buku tersebut, Young memperlihatkan paradoks meritokrasi. Di satu sisi, meritokrasi mengidealkan kesetaraan serta menentang feodalisme, aristokrasi dan nepotisme. Dalam masyarakat agrikultural (pra-modern), status dan jabatan publik tidak ditentukan oleh prestasi, melainkan oleh hierarki: apakah Anda keturunan bangsawan atau rakyat jelata, berkulit putih atau hitam, keturunan orang merdeka atau budak. Mobilitas sosial dari bawah ke atas mustahil. Meritokrasi membawa revolusi sosial, dan karena itu mendukung demokrasi. Di sisi lain, dalam masyarakat modern meritokrasi justru menciptakan jenis-jenis ketimpangan baru ketika posisi sosial dan prestasi seseorang semakin ditentukan oleh privilese sosial dan modal ekonomi. “Sungguh menakjubkan,” tulis Young, “berapa banyak dokter adalah anak-anak dokter, berapa banyak pengacara adalah anak-anak pengacara, begitupun berbagai profesi strategis lainnya. Dalam era industri dan perdagangan ini, orang-orang sukses dengan mudah mengirim anak-anak mereka ke profesi terpandang, melalui prestasi mereka, sama seperti melalui keturunan dalam masyarakat feodal.”¹³

Sandel juga berpendapat bahwa meritokrasi paradoks. Di satu sisi, meritokrasi memungkinkan setiap orang memperbaiki nasibnya dengan mengasah bakat dan kemampuan individual. Di sisi lain, di era globalisasi pasar, meritokrasi tidak menghapus ketidaksetaraan, malah mempertajamnya. Menurut Sandel, selama setengah abad terakhir, meritokrasi berhasil membuka hambatan ras, agama, gender dan etnisitas, tetapi hari ini telah mengeras menjadi aristokrasi turun-temurun.¹⁴ Bertolak lebih dalam daripada sekadar analisis tentang paradoks meritokrasi, Sandel memandang meritokrasi sebagai sebuah ideologi.

Sebelum menjelaskan meritokrasi sebagai ideologi, perlu diuraikan terlebih dahulu distingsi antara *merit* dan meritokrasi, agar kita tak salah paham. Dibandingkan feodalisme, plutokrasi dan nepotisme, ide tentang *merit* adalah ide yang baik. Prestasi dan kemampuan seseorang dalam pekerjaan dan peran sosial adalah hal yang baik dalam bidang praktis. Misalnya, ketika ingin mencabut gigi, Anda tentu membutuhkan dokter gigi profesional. Yang dikritik Sandel adalah meritokrasi. Berbeda dari *merit*, meritokrasi adalah sebuah etika atau keyakinan tertentu terhadap prestasi dan kesuksesan. Keyakinan ini membentuk “*system of rule*” yang didasarkan pada kesuksesan dan prestasi seseorang. Yang dimaksud *system of rule* adalah cara mengalokasikan pendapatan, kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan harga diri. Etika meritokratis disimpulkan dalam proposisi: jika peluang dibagi secara *fair* kepada setiap individu, maka para pemenang layak menghirup kesuksesan mereka sepuas-puasnya, dan bagi mereka yang kalah tak ada yang perlu disalahkan selain diri sendiri.¹⁵ Ini adalah klaim moral yang melampaui proposisi praktis bahwa adalah hal yang baik bila kita bekerja keras dan profesional dalam pekerjaan dan peran sosial kita. Klaim moral ini adalah sisi gelap meritokrasi.

¹³ Michael Young, *The Rise of Meritocracy 1870-2033, An Essay on Education and Equality* (London: Penguin Books, 1961) 25.

¹⁴ Michael Sandel, *The Tyranny*, *op.cit.*, 109-110.

¹⁵ *Ibid.*, 19.

Saya berpendapat, argumentasi Sandel beralasan. Dalam empat dekade terakhir, masyarakat liberal AS dan para politisi Partai Demokrat berkeyakinan bahwa kesenjangan politik yang penting saat ini bukan lagi kiri versus kanan, melainkan terbuka versus tertutup. Di dunia terbuka, prestasi individu bergantung pada kerja keras, otonomi dan dedikasi pribadi. Namun, meskipun benar bahwa prestasi individu mencerminkan kerja keras dan dedikasi pribadi, pandangan bahwa prestasi individu semata-mata bergantung pada kerja keras, terlepas dari peran komunitas dan kolektif adalah pandangan sesat, yang basis filosofisnya ditemukan pada gagasan liberal tentang *unencumbered self*. Karena itu, meritokrasi sebetulnya adalah sebuah ideologi, dalam pengertian Marxian, yaitu kesadaran palsu. Ideologi ini membuat masyarakat liberal seperti AS mengimani fiksi bahwa prestasi individu adalah segalanya. Tentu saja Sandel tidak mengatakan prestasi tak penting. Yang dikoreksinya adalah *the tyranny of merit* atau keyakinan bahwa prestasi individu menentukan segalanya: kemajuan sosial, kesejahteraan, pendapatan, pengakuan sosial, harga diri, dan martabat kerja seseorang.

Konsep Sandel tentang meritokrasi sebagai ideologi dapat dirumuskan dalam beberapa tesis afirmatif berikut. Pertama, inti keyakinan meritokratis adalah pandangan bahwa nasib kita menggambarkan prestasi atau jasa kita; kita bertanggung jawab atas nasib kita dan pantas mendapatkan apa yang kita dapatkan. Berdasarkan keyakinan ini, para pemenang dalam masyarakat meritokratis menganggap kesuksesan mereka sebagai hadiah yang adil untuk kapasitas dan pencapaian mereka sendiri serentak memandang rendah mereka yang gagal. Para pecundang (*losers*) merasa tidak ada yang bisa dikutuk selain diri sendiri.¹⁶

Keyakinan ini mencerminkan para pemenang yang menghirup kesuksesan mereka terlalu dalam dan melupakan keberuntungan yang membantu mereka. Apa maksudnya? Bagi Sandel, ada dua kontingensi moral yang mendasari penolakan terhadap proposisi meritokratis bahwa para pemenang layak menghirup kesuksesan mereka sepuas-puasnya: 1) Memiliki bakat atau kemampuan tertentu bukan hasil kerja keras individu belaka, melainkan “*a matter of good luck*”, suatu keberuntungan atau berkat. Berkat tak selalu bermakna teologis. Komunitas di mana seseorang lahir dan hidup adalah berkat. Sandel menentang anggapan bahwa 100% alasan orang sukses adalah kerja keras. Baginya, faktor penting lain di samping kerja keras adalah bakat, sesuatu yang tidak hanya kita usahakan sendiri melainkan juga terberi.¹⁷ Sepanjang status moral bakat adalah suatu pemberian, maka adalah sebuah kesalahan untuk berpikir bahwa kesuksesan kita adalah hasil kerja keras kita sendiri. 2) Komunitas menjadi berkat sebab mereka yang berbakat hanya bisa mengembangkan bakatnya dalam komunitas yang menghargai bakat-bakat tersebut. Contohnya, bintang sepak bola seperti Ronaldo atau Messi beruntung lahir dalam masyarakat yang mencintai sepak bola. Andai mereka hidup di abad pertengahan di mana lukisan Fresco lebih diminati, ceritanya pasti berbeda. Jadi, keyakinan meritokratis adalah keyakinan sombong dari mereka yang mendarat di atas bahwa mereka pantas merayakan nasib mereka karena kerja keras sendiri, dan bahwa mereka yang merayap di bawah juga pantas bernasib demikian karena kesalahan sendiri. Cara pandang inilah yang mendampingi moral politik teknokratis liberal.¹⁸

Namun, gagasan tentang bakat sebagai pemberian tersebut menimbulkan pertanyaan. Jika individu lahir dengan bakat alami yang berbeda-beda dan bakat tersebut menentukan prestasi seseorang,

¹⁶*Ibid.*, 18.

¹⁷*Ibid.*, 150.

¹⁸*Ibid.*, 28.

bukankah itu berarti ketimpangan dalam masyarakat adalah sesuatu yang wajar? Bukankah gagasan ini jauh lebih berbahaya daripada klaim bahwa bakat bergantung pada usaha individu? Terhadap keberatan tersebut, Sandel berpendapat bahwa gagasan bakat alami bukanlah pembenaran atas asumsi bahwa yang paling sukses adalah yang paling berbakat. Bagi Sandel, kaum liberal egalitarian keliru ketika terpaku pada perbedaan bakat-bakat alami individu sebagai sumber ketidaksetaraan pendapatan.¹⁹

Kita dapat menerangkan maksud Sandel dengan argumen berikut. Mungkin benar bahwa pencapaian Mozart atau Einstein adalah hasil dari kejeniusan alami mereka yang khas. Tetapi tidak masuk akal untuk berpikir bahwa perbedaan kejeniusan alami membenarkan ketimpangan pendapatan. Sukses menghasilkan uang tak ada hubungannya dengan bakat-bakat alami. Kenyataan bahwa seorang komisaris BUMN menghasilkan lebih banyak uang ketimbang seorang guru sekolah menengah tidak membuktikan bahwa si komisaris memiliki kejeniusan atau bakat alami yang lebih tinggi dibandingkan si guru. Demikian pun seorang influencer Instagram atau *youtuber* yang sukses memanen banyak uang tak membuktikan dia lebih bertalenta dibandingkan seorang perawat, teknisi listrik, atau petugas pemadam kebakaran yang melakukan pekerjaan penting bagi kebaikan publik (tak jarang mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri). Itu berarti, kita tak perlu memasuki perdebatan sengit tentang dasar genetik dari kecerdasan untuk melihat bahwa ketimpangan pendapatan dan kekayaan hari ini tak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Gagasan bahwa penghasilan yang lebih besar dari orang-orang yang bekerja di bidang keuangan, bisnis atau profesi elit terletak pada keunggulan genetik atau bakat-bakat alami mereka, merupakan gagasan yang sengaja dibuat-buat untuk membenarkan hierarki meritokratis, ketidaksetaraan, bahkan rasisme.

Kedua, meritokrasi menjunjung tinggi tanggung jawab individu. Sebelum 1980, debat tentang negara kesejahteraan adalah debat tentang solidaritas atau apa yang kita lakukan sebagai sesama warga negara. Namun setelah dekade 1980-an, etika solidaritas disingkirkan oleh etika sukses yang menekankan tanggung jawab individu. Karena gagasan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, maka masyarakat liberal seperti AS percaya bahwa orang-orang sukses pantas bernasib baik, dan siapa yang gagal, jelas salah sendiri.²⁰ Konsep tanggung jawab individu inilah petunjuk utama etika meritokrasi dalam masyarakat modern.

Meyakinkan orang agar bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan adalah hal yang baik. Ini menghormati kapasitas manusia untuk berpikir dan bertindak otonom. Namun, bertanggung jawab secara moral dan otonom adalah hal yang berbeda dari inti etika meritokratis, bahwa kita sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib kita dalam hidup.²¹ Jika kesuksesan bergantung pada tanggung jawab individu belaka, bagaimana peran orang tua, guru, atau dosen yang membantu seseorang berprestasi? Bagaimana dengan bakat dan karunia yang tidak sepenuhnya dia ciptakan sendiri? Bagaimana dengan lingkungan atau masyarakat yang menghargai bakat yang dimiliki seseorang? Dan jika kegagalan adalah tanggung jawab pribadi, bagaimana dengan mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup namun tetap gagal mengubah nasib? Meritokrasi tak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Meritokrasi hanya

¹⁹ *Ibid.*, 179-180.

²⁰ *Ibid.*, 63.

²¹ *Ibid.*, 36.

mengkonstruksi klaim moral yang tak adil bahwa pemenang layak bertengger di atas, sedangkan pecundang layak meratapi kegagalannya sebagai sebuah aib.

Ketiga, berdasarkan keyakinan bahwa nasib kita sepenuhnya bergantung pada tanggung jawab individu, meritokrasi menyebarkan retorika kebangkitan. Retorika kebangkitan terangkum dalam slogan bahwa mereka yang bekerja keras dan bermain sesuai aturan dapat bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan mereka sejauh bakat membawa mereka ke harapan itu. Bagi Sandel, slogan ini membuat banyak orang di AS toleran terhadap ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Mereka menghidupkan “iman” meritokratis bahwa apapun titik awal seseorang dalam hidup, adalah selalu mungkin untuk bangkit dari miskin menjadi kaya. Keyakinan akan mobilitas naik ini berada di jantung impian seluruh rakyat AS.²²

Namun keyakinan bahwa siapapun yang bekerja keras dan berbakat bisa bangkit tidak lagi sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam globalisasi pasar saat ini, tidak mudah untuk bangkit. Orang Amerika yang lahir dari keluarga miskin cenderung tetap miskin sampai dewasa meskipun telah bekerja keras. Dari mereka yang lahir di peringkat kelima terbawah dalam skala pendapatan, hanya satu yang bisa menggerakkan nasibnya ke peringkat kelima teratas. Sebagian besar bahkan tidak naik ke kelas menengah meski telah bekerja keras.²³ Hal semacam itu tak hanya terjadi di AS. Pada tahun 2019, SMERU Research Institute menemukan bahwa secara umum di Indonesia anak-anak orang miskin cenderung tetap miskin ketika mereka sudah dewasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dewasa, selisih pendapatan anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin 87% lebih rendah dibandingkan anak-anak yang lahir dalam keluarga kaya.²⁴ Artinya di Indonesia, anak-anak orang miskin cenderung tetap miskin sampai dewasa sehingga rantai kemiskinan sulit putus. Jika meritokrasi mengidealkan mobilitas, dalam kenyataan mobilitas naik itu tidak terjadi. Mayoritas orang miskin tetap miskin meskipun telah bekerja keras, sedangkan orang-orang kaya cenderung semakin kaya.

Tesis itu bukan tanpa jaminan. Dalam beberapa dekade terakhir, ketidaksetaraan memang tidak mempercepat mobilitas ke atas tetapi memungkinkan mereka yang berada di atas mengkonsolidasikan keuntungan dan mewariskannya kepada anak cucu mereka. Karena itu, alih-alih menggugurkan, meritokrasi justru mereproduksi aristokrasi turun-temurun. Data statistik menunjukkan bahwa dari sebagian besar pendapatan Amerika sejak akhir 1970, 10% mengalir ke kelompok teratas sedangkan sebagian besar kelompok bawah tak menerima apa-apa. Hari ini 1% orang terkaya di hampir setiap negara menguasai keuntungan dan sumber daya lebih dari gabungan seluruh jumlah pendapatan separuh kelompok kelas menengah ke bawah. Keadaan ini menjelaskan mengapa retorika peluang yang *fair* dan mobilitas ke atas yang didengungkan para elit politik liberal gagal menginspirasi dan memotivasi masyarakat miskin dan kelas pekerja. Para elit politik harus mempertimbangkan lagi asumsi mereka tentang mobilitas sosial. Menurut Sandel, “mereka perlu memperhitungkan faktor ketimpangan kekuasaan

²²*Ibid.*, 26.

²³*Ibid.*, 72.

²⁴Rendy A. Diningrat, “Mengapa Anak dari Keluarga Miskin Cenderung akan Tetap Miskin ketika Dewasa: Penjelasan Temuan Riset SMERU,” *The Conversation*, 3 Desember 2019. <https://theconversation.com/mengapa-anak-dari-keluarga-miskin-cenderung-akan-tetap-miskin-ketika-dewasa-penjelasan-temuan-riset-smeru-127625>.

dan kekayaan daripada puas beristirahat dengan proyek-proyek membantu orang menaiki tangga yang anak tangganya tumbuh semakin jauh dan terpisah.”²⁵

Jika kita cermati, Sandel sebetulnya mau menunjukkan bahwa retorika tanggung jawab dan mobilitas membuat meritokrasi menjadi racun. *Pertama*, dalam kondisi ketimpangan struktural yang merajalela dan mobilitas ke atas yang terhenti, mengulangi pesan bahwa kita bertanggung jawab atas nasib kita dan dapat mengubah keadaan asalkan terus bekerja keras adalah sesuatu yang menyakitkan bagi mereka yang telah bekerja keras namun tetap tertinggal. Keyakinan ini juga mengikis solidaritas dan membenarkan demoralisasi yang ditimpakan globalisasi. *Kedua*, bersikeras bahwa kunci menghadapi ketimpangan adalah meningkatkan akses ke universitas dapat merendahkan martabat kerja para buruh tak berijazah sarjana. *Ketiga*, bersikeras bahwa masalah sosial dan politik hanya bisa diselesaikan oleh para ahli adalah kesombongan meritokratis yang merusak demokrasi dan partisipasi sipil lebih luas.

Kita bisa menentang argumen Sandel dengan gagasan bahwa meritokrasi, bagaimanapun juga, tetap dibutuhkan masyarakat demokratis sebab merupakan senjata filosofis dan moral dalam melawan hirarki yang tak adil, represif dan diskriminatif. Tanpa mengabaikan catatan itu, saya kira, kritik Sandel tidak saja mengandung kebenaran tetapi juga berguna. Jika kita cermati argumennya, sebetulnya kelemahan utama meritokrasi ialah kengototannya pada mobilitas (*mobility*), bukan kesetaraan (*equality*). Meritokrasi meyakinkan setiap orang bahwa sukses dan prestasi individu lebih penting daripada tujuan sosial karena prestasi individu yang dicapai secara *fair* dianggap dapat mendorong kemajuan sosial. Namun, alih-alih kemajuan sosial, meritokrasi justru menciptakan polarisasi sosial dan kemunduran demokrasi sebab asumsi-asumsi meritokratis tidak melawan ketimpangan melainkan mempertajamnya. Meritokrasi misalnya tidak mempersoalkan ketimpangan orang kaya dan miskin, orang terdidik dan kurang terdidik, atau titik start yang berbeda dalam perlombaan meritokratis. Bagi meritokrasi, hierarki antara orang kaya dan miskin, pemenang dan pecundang, terdidik dan kurang terdidik adalah *fair* sebab merupakan hasil tak terhindarkan dari adanya perbedaan-perbedaan objektif dalam hal kemampuan, bakat, dan kerja keras. Orang kaya menjadi kaya karena dianggap lebih rajin dan lebih cerdas. Sebaliknya, orang miskin menjadi miskin karena malas dan kurang cerdas. Apa bedanya pandangan ini dengan asumsi rasial para pendukung supremasi kulit putih bahwa ada sesuatu dalam darah atau gen orang Kaukasia yang membuat orang kulit putih secara alami lebih cerdas, bermoral, dan lebih mampu ketimbang orang kulit hitam?²⁶ Meritokrasi memang menolak rasisme, tetapi pada saat yang sama, sama seperti rasisme, klaim-klaim meritokratis juga menghasilkan diskriminasi, penghinaan, dan polarisasi sosial.

Menarik bahwa Sandel juga mengkritik diskriminasi terhadap kaum yang disebut *the dumb* (orang-orang kurang terdidik). Kritik Sandel ini penting karena pada umumnya kita jarang sekali menyadari ketimpangan antara kaum terdidik dan tak terdidik sebagai sebuah masalah. Bagi Sandel, meskipun dalam beberapa dekade terakhir ketidakadilan rasial dan seksual berhasil dikurangi, namun muncul satu jenis ketimpangan luar biasa yang jarang disorot dalam politik liberal yaitu ketimpangan antara kaum terdidik dan tidak terdidik. Para pekerja tak bergelar sarjana sering dihina sebagai kaum

²⁵Sandel, Michael Sandel, “Populism, Liberalism and Democracy,” *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 44(4) (2018) 356. <https://doi.org/10.1177/0191453718757888>.

²⁶ Yuval N. Harari, *Homo Sapiens*, penerj. Damarying Tyas (Jakarta: KPG, 2011) 160.

kurang terdidik. Jika rasisme dan seksisme dikutuk sebagai kesalahan moral, diskriminasi terhadap kaum kurang terdidik sebaliknya diterima sebagai prasangka moral yang wajar. Anggapan arogan ini mengikis harga diri para pekerja tak bergelar sarjana dan memicu kebencian mereka terhadap elit-elit politik liberal.²⁷ Protes buruh di AS yang mengiringi keberhasilan populisme Trump tahun 2016 adalah bentuk pemberontakan terhadap keyakinan arogan meritokrasi tersebut.

Kita bisa bertanya, mengapa hierarki kaum terdidik dan kurang terdidik diterima sebagai prasangka moral yang wajar? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali kepada klaim meritokrasi bahwa sejauh suatu hierarki sosial berakar pada perbedaan-perbedaan objektif dalam hal kemampuan dan kerja keras individual, maka hierarki tersebut adalah *fair*. Dibandingkan orang-orang kurang terdidik, orang-orang terdidik secara objektif dianggap lebih cerdas dan layak masuk ke universitas. Meritokrasi sulit mengakui bahwa banyak orang tak bisa masuk ke universitas bukan karena kurang cerdas melainkan karena biaya mahal dan ketimpangan struktural. Ketimpangan privilese sosial dan kapital juga tidak memungkinkan anak-anak orang miskin bisa bersaing dengan anak-anak orang kaya, meskipun lapangan persaingannya rata dan kedua pihak memiliki peluang yang *fair*. Jadi klaim bahwa setiap orang dapat mendaki tangga sukses asalkan bekerja keras baik sebagai hiburan, tetapi buruk sebagai fakta. Keyakinan-keyakinan meritokratis menyebarkan penghinaan moral pada orang-orang yang merasa bahwa ekonomi, politik, dan budaya telah menelantarkan mereka meskipun mereka telah bekerja keras.

Tirani Meritokrasi dan Reimajinasi Solidaritas

Seperti telah diterangkan di atas, inti meritokrasi adalah gagasan bahwa di bawah prinsip persamaan peluang yang *fair*, mereka yang mendarat di atas berhak atas kesuksesan mereka, dan mereka yang gagal, bertanggung jawab atas kegagalan mereka sendiri. Keyakinan ini membuat kohesi sosial dan solidaritas renggang dan tak pasti. Krisis solidaritas turut menandai krisis demokrasi dewasa ini. Karena itu, Sandel mengusulkan perlunya revitalisasi diskursus publik sebagai jalan keluar dari bahaya tirani meritokrasi. Revitalisasi diskursus publik berarti peninjauan kembali asumsi-asumsi liberal tentang *unencumbered self* dalam sebuah masyarakat yang semakin sekular namun mengalami krisis solidaritas dan imajinasi bersama sebagai bangsa. Individu perlu diikat kembali pada komunitas politik konkret yang disebut negara-bangsa. Atas dasar gagasan ini, Sandel berpendapat bahwa sebuah demokrasi tidak bisa dibangun di atas kumpulan pribadi atomistik yang asing dan sepi, melainkan di atas solidaritas dan perasaan kebersamaan yang kuat sebagai satu ikatan negara-bangsa.

Dalam pengertian Sandel, solidaritas adalah suatu upaya mewujudkan *common good* berdasarkan ikatan sosial dan rasa hormat satu sama lain,²⁸ atau perasaan bahwa secara moral kita berutang satu sama lain sebagai warga negara sehingga menuntut kepedulian dan kewajiban timbal balik.²⁹ Seturut konsep ini, solidaritas tak hanya terkait dengan distribusi yang adil seperti dalam teori keadilan Rawls melainkan terutama keyakinan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan berbudaya, serta layak dihargai, terlepas dari apakah mereka bangkit atau tidak, sukses atau gagal, terdidik atau kurang terdidik. Mengutip James T. Adams, solidaritas bukan tentang mimpi bagaimana warga negara bisa memiliki mobil atau gaji tinggi saja, melainkan tentang suatu tatanan sosial di mana setiap warga

²⁷ Sandel, *Tyranny*, *op.cit.*, 173 & 179.

²⁸ *Ibid.*, 12.

²⁹ *Ibid.*, 63.

negara saling menghargai terlepas dari posisi sosial, status ekonomi atau tingkat pendidikan.³⁰ Dalam konteks ini, solidaritas terkait dengan pengakuan sosial sebagai ciri masyarakat setara dan demokratis.

Solidaritas yang dimaksud Sandel - memakai bahasa Jody Dean - lebih dekat ke solidaritas reflektif daripada solidaritas konvensional atau komunitarian. Solidaritas reflektif adalah solidaritas komunikatif di mana individu terhubung dengan suatu “we” (kita) atau komunitas dengan merefleksikan harapan mengenai orang lain yang digeneralisasi. Dalam proses ini, kebaikan bersama dan otonomi individu tidak saling menegasi tetapi saling menegaskan. Ini berbeda dari solidaritas komunitarian yang cenderung menafsirkan kolektivitas sosial secara eksklusif sehingga berpotensi menyalakan otonomi dan hak individu.³¹

Perlu diketahui bahwa Sandel tidak mengajukan gagasan solidaritas universal, komunitas moral universal, ikatan kewarganegaraan global, atau sentimen kosmopolitan ala William Lloyd yang berslogan: “*Our country is the world; our countrymen are all mankind.*”³² Solidaritas kosmopolitan berarti setiap orang memiliki empati universal melampaui batas negara dan menjadi warga dunia. Solidaritas kosmopolitan mampu menangkalkan bahaya parokialisme dan nasionalisme sempit. Namun solidaritas kosmopolitan juga bermasalah. Menurut Sandel, sentimen moral dalam solidaritas kosmopolitan dapat menutupi rasa kewajiban terhadap mereka yang berada di sekitar kita. “Mencintai kemanusiaan,” tulis Sandel, “adalah sentimen mulia, tetapi sebagian besar pengalaman hidup kita membutuhkan solidaritas yang lebih kecil dan tersituasi, yang berarti ada batas tertentu untuk setiap simpati moral, dan bahwa kita belajar mencintai kemanusiaan mulai dari konteks tertentu.”³³ Sandel tak menolak pandangan bahwa kita berkewajiban tertentu terhadap kemanusiaan universal. Yang ditolak adalah klaim bahwa identitas kosmopolitan lebih baik daripada identitas komunal.

Sandel tampaknya mengusulkan solidaritas yang lebih kecil dan tersituasi yang disebut *smaller solidarity*. Dalam konteks politik dan hubungan antarwarga negara, *smaller solidarity* dapat dipahami sebagai solidaritas kebangsaan. Yang dimaksud bukan nasionalisme identitas yang sempit melainkan solidaritas terhadap orang-orang yang hidup berdampingan dengan kita, entah penganut agama, ideologi atau suku yang berbeda. Kritik terhadap diri kosmopolitan serupa dengan kritik terhadap *unencumbered self*. Mengklaim bahwa saya mencintai semua orang secara universal mendahului kewajiban moral atau solidaritas saya terhadap orang lain yang bertetangga dengan saya, berarti menegaskan lagi *unencumbered self* liberal tersebut.

Konsep *smaller solidarity* Sandel mengingatkan kita pada konsep solidaritas seorang liberal ironis AS, Richard Rorty. Bagi Rorty, solidaritas tidak dapat dilukiskan dengan kosa kata universal karena setiap kosa kata merujuk pada satu komunitas tertentu saja. Pemaknaan kita terhadap solidaritas, kata Rorty, menjadi sangat kuat ketika orang-orang yang kepadanya solidaritas itu diekspresikan, dilihat sebagai salah satu dari antara kita di mana ‘kita’ di sini berarti sesuatu yang lebih kecil dan lokal daripada

³⁰ *Ibid.*, 209-210.

³¹ Muelen, “Solidarity, Justice and Recognition of the Other,” *Theor Med Bioeth*, Vol. 37 (2016) 524. DOI 10.1007/s11017-016-9387-3.

³² Terry Hall, “Beyond the Procedural Republic: The Communitarian Liberalism of Michael Sandel,” *An Introduction to Contemporary Liberal Political Theory and Its Critics*, ed. Christopher Wolfe (USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2003) 111.

³³ Sandel, *Democracy’s Discontent*, *op.cit.*, 342-343.

seluruh umat manusia.³⁴ Solider dengan korban perang di Afganistan misalnya adalah sesuatu yang sangat mulia, namun naif ketika kita masih memusuhi tetangga kita lantaran beda keyakinan. Solider dengan orang-orang kulit hitam yang menjadi korban rasisme di AS tentu saja berharga, tetapi menjadi tak bermakna ketika kita bungkam dengan rasisme yang menimpa minoritas Papua dan Tionghoa di negeri ini.

Gagasan Sandel tentu tidak bisa kita terima seluruhnya. *Smaller solidarity* hanya mencakup sesama warga negara yang amat terbatas. Berhadapan dengan kelompok *the rightless* seperti imigran atau orang asing, yang dibutuhkan bukan *smaller solidarity* tetapi *global solidarity* (solidaritas global) yang bersifat kosmopolitan. Dengan kata lain, berhadapan dengan kelompok *the rightless*, kita membutuhkan perangai kosmopolitan, dan perangai kosmopolitan ini, seperti kata Kant, menuntut rasa hormat dan pengakuan akan hak setiap orang untuk mendiami suatu tempat di mana saja di bumi ini.³⁵

Saya berpikir bahwa gagasan *smaller solidarity* perlu dipahami dalam konteks menguatnya polarisasi sosial dan permusuhan dalam negeri. Orang AS hari ini lebih takut dan curiga satu sama lain ketimbang takut dengan Rusia atau Cina. Lima puluh tahun lalu, kaum demokrat dan republikan sama-sama takut bahwa Rusia datang menghancurkan cara hidup masyarakat AS. Hari ini, kaum demokrat dan republikan juga para pendukung mereka saling curiga dan takut. Di banyak negara, seperti Libya, Afghanistan, Irak, juga Indonesia, rapuhnya *smaller solidarity* sering menyebabkan perang saudara, konflik SARA dan terorisme. Jadi, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, ketika globalisasi menyapu setiap batas dan menembus setiap sekat dan ketika nasionalisme setiap saat harus berhadapan dengan kosmopolitanisme yang memikat, kita membutuhkan reimajinasi dan penguatan integrasi dan solidaritas nasional.³⁶

Dalam hubungan dengan meritokrasi, Sandel berpendapat bahwa meritokrasi membuat solidaritas mustahil atau membuat kita semakin sulit untuk percaya bahwa “kita berada di atas perahu yang sama” sekarang. Ini tidak hanya mengundang para pemenang mempertimbangkan kesuksesan mereka sebagai perbuatan dan prestasinya sendiri tetapi juga mendorong mereka yang merayap di bawah merasa bahwa para pemenang memandang mereka dengan hina. Dengan memakai ungkapan Martin Luther King, Jr. di atas - “kita berada di atas perahu yang sama” - Sandel menunjukkan bahwa ideologi meritokrasi adalah akar krisis solidaritas. “Keyakinan meritokratis bahwa orang berhak atas kekayaan apapun yang diberikan pasar berkat bakat-bakat mereka,” tulis Sandel, “membuat solidaritas menjadi sebuah proyek yang mustahil.”³⁷

Keyakinan meritokratis sejalan dengan inti gagasan liberal bahwa saya adalah seorang *unencumbered self* yang tak terikat dengan orang lain dan komunitas di mana saya hidup, dan orang lain hanya kebetulan ada di samping saya. Antropologi liberal ini menjelaskan pentingnya otonomi individu, namun serentak mengasingkan individu dari dunia bersama. Sandel berpendapat, keterasingan ini menyulitkan individu liberal mengolah solidaritas dan rasa komunitas.³⁸ Dalam masyarakat meritokratis, klimaks gagasan liberal ini diekspresikan dalam keyakinan bahwa saya memiliki kemampuan untuk

³⁴ Richard Rorty, *Contingency, Irony and Solidarity* (New York: Cambridge University Press, 1989), 191.

³⁵ I. Kant, *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*, ed. by Pauline Kleingeld (London: Yale University Press, 2006), 82.

³⁶ Ignas Kleden, “Nasionalisme Mencari Demokrasi,” *Tempo, Merawat Indonesia*, Agustus 2005, 10.

³⁷ Sandel, *The Tyranny*, *op.cit.*, 212.

³⁸ Michael Sandel, *Justice What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010) 267.

mengendalikan takdirku dengan kerja keras. Karena saya adalah seorang *unencumbered self*, maka kesuksesanku bukan hadiah dari komunitas atau masyarakat di mana saya hidup, melainkan hak dan kebajikan saya sepenuhnya.³⁹ Atau jika para pemenang dan pecundang dalam dunia penuh pertarungan ini sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib sendiri, maka posisi sosial seseorang mencerminkan apa yang pantas dia terima.

Gagasan ini adalah sisi gelap meritokrasi bagi solidaritas dan demokrasi. Semakin kita memandang diri sebagai mandiri dan cukup diri, semakin kecil kemungkinan kita untuk peduli pada nasib mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita sendiri. Jika kesuksesanku adalah hasil kerja kerasku sendiri, kegagalan mereka pastilah kesalahan mereka sendiri. Logika ini membuat meritokrasi merusak kebersamaan dan solidaritas. Gagasan yang terlalu berat tentang tanggung jawab pribadi atas nasib ini juga membuat kita semakin sulit membayangkan diri berada pada posisi orang lain.⁴⁰ Dengan kata lain, semakin kita menganggap bahwa otonom berarti cukup diri, kita semakin sulit belajar berempati, bersyukur, dan bersikap rendah hati.

Demokrasi, di mana pun, bergantung pada solidaritas, dan untuk mempertahankannya, sebuah bangsa perlu menghasilkan solidaritasnya sendiri, terus-menerus, dalam menghadapi setiap tantangan baru. Untuk menyelamatkan demokrasi dari bahaya meritokrasi, kita perlu menghidupkan lagi imajinasi solidaritas. Namun, reimaginasinya tak cukup hanya dengan mengurangi ketimpangan ekonomi sebagaimana diproposalkan Rawls lewat teori keadilan distributif. Reimaginasinya menuntut perubahan sikap moral dan cara pandang terhadap kesuksesan dan kegagalan. Sikap moral yang mampu menumbuhkan solidaritas tersebut adalah sentimen kerendahan hati (*humility*). Kerendahan hati bagi Sandel adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari komunitas dan masyarakat di mana kita hidup, dan bahwa bakat-bakat, prestasi dan pencapaian kita bukan hasil perbuatan kita sendiri belaka melainkan bergantung pada sumber daya sosial dan masyarakat yang menghargai bakat-bakat tersebut.⁴¹ Konsep kerendahan hati dalam politik ini tentu saja perlu didahului oleh perubahan cara pandang terhadap individu: dari individu sebagai *unencumbered self* belaka sebagaimana dalam konsep liberal kepada individu sebagai bagian yang terpisahkan dari komunitas politik konkret negara-bangsa dan tujuan-tujuan sosialnya. Dengan demikian, kerendahan hati bukan sekadar kebajikan privat melainkan etika sosial yang berguna dalam mematahkan klaim-klaim meritokratis dan menumbuhkan kembali imajinasi solidaritas.

Implikasi

Mengapa pemikiran Sandel penting untuk kita bahas? Apa implikasinya bagi demokrasi di Indonesia? Kritik Sandel terhadap meritokrasi mengungkapkan suatu problem moral serius yang juga relevan dalam konteks Indonesia. Globalisasi pasar dewasa ini bukan saja globalisasi modal dan hegemoni neoliberal. Ada hal yang lebih mencemaskan kita yaitu globalisasi moral yang congkak. Para pemenang kompetisi pasar bebas yakin bahwa mereka pantas menghirup kesuksesan dan kekayaan mereka karena kerja keras dan prestasi individu, sementara kegagalan orang-orang miskin adalah kesalahan orang-orang miskin sendiri. Pandangan ini tak saja menyebarkan keangkuhan di antara para

³⁹ Sandel, *The Tyranny*, *op.cit.*, 59.

⁴⁰ *Ibid.*, 59.

⁴¹ *Ibid.*, 211.

pemenang, tetapi juga mendistorsi pengertian kita tentang demokrasi. Demokrasi bukan arena kompetisi untuk menggapai sukses pribadi melainkan sistem yang memungkinkan kita bekerja sama untuk mewujudkan *bonum commune*. Karena itu, jika meritokrasi mencita-citakan prestasi individual sebagai syarat kemajuan sosial dengan akibat jurang ketimpangan melebar, demokrasi sebaliknya menuntut adanya kesetaraan yang lebih besar. Demokrasi memang tidak membutuhkan kesetaraan sempurna tetapi mutlak membutuhkan warga negara yang saling berbagi dan solider dalam kehidupan bersama berdasarkan kesadaran moral tentang diri yang terhubung dengan yang lain dan komunitas. Dalam hal ini, solidaritas dan rasa senasib-sepenanggungan adalah jiwa dan nyawa demokrasi.

Kritik Sandel atas meritokrasi juga menyadarkan kita bahwa memang saat ini martabat manusia ditakar menurut standar pasar. Jika Anda menghasilkan banyak uang, Anda dihormati. Jika tidak, Anda dihina. Pekerjaan Anda dihormati atau tidak bergantung pada gelar pendidikan Anda atau jumlah uang yang Anda hasilkan. Karena itu, ada pemimpin partai seperti Megawati yang tak segan-segan menghina tukang bakso.⁴² Moral semacam ini sedang menyebar: suatu globalisasi kecongkakan. Bukan kebetulan bahwa keyakinan congkak ini menguat seiring meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat kita. Fenomena ini mengungkap dua hal yang menjungkir-balik demokrasi kita: *pertama*, jurang ketimpangan sosial yang makin lebar antara orang kaya dan miskin; *kedua*, sejalan dengan meningkatnya ketimpangan sosial, semakin tinggi pula moral congkak yang menyebarkan penghinaan dan kebencian di antara mereka yang kalah. Kedua hal ini tidak baik untuk kesehatan demokrasi.

Hasil penelitian SMERU Research Institute yang disebutkan di atas memperlihatkan ketimpangan sosial di Indonesia. Orang-orang kaya mewariskan kekayaan kepada anak-anak mereka, sedangkan anak-anak orang miskin cenderung tetap miskin ketika dewasa. Mengapa demikian? Apakah karena anak-anak orang miskin terlalu malas dan bodoh, sedangkan anak-anak orang kaya lebih mampu dan bekerja lebih keras? Mereka yang percaya kepada klaim meritokratis cenderung setuju bahwa seseorang menjadi miskin karena kurang kerja keras. Namun, penelitian ini membuktikan sebaliknya bahwa ternyata untuk keluar dari jerat kemiskinan tidaklah semudah yang orang kira sebab kemiskinan keluarga akan membatasi anak-anak orang miskin untuk memperoleh berbagai kesempatan yang diperlukan dalam memperbaiki nasib mereka.⁴³ Dengan kata lain, kerja keras bukan satu-satunya faktor penunjang kesuksesan. Perbedaan modal ekonomi dan privilese kelas juga sangat berpengaruh. Anak-anak dari *working class* dan anak-anak dari *higher economy class* yang sama-sama cerdas dan bekerja keras bisa berakhir pada nasib yang berbeda karena perbedaan kapital. Hasil penelitian tersebut membuktikan kekeliruan klaim meritokratis di Indonesia.

Di sisi lain, kesenjangan makin lebar antara segelintir orang kaya yang menguasai sebagian besar aset negara dan sejumlah besar orang miskin adalah penanda penting menguatnya meritokrasi di Indonesia. Bangunan demokrasi dan demokratisasi sedang runtuh oleh fakta bahwa *free movements of goods, capital, and labor* tidak menghasilkan suatu ekuilibrium baru, tetapi kesenjangan baru dengan dukungan penuh kaum plutokrat⁴⁴ Segelintir pemodal menguasai harta yang menjadi milik lebih dari 200

⁴² Galih Prasetyo, "Buntut Pidato Megawati Soekarnoputri, Tukang Bakso Jadi Trending Topic." <https://bogor.suara.com/read/2022/06/23/100643/buntut-pidato-megawati-soekarnoputri-tukang-bakso-jadi-trending-topic-publik-terima-kasih-telah-menghina>.

⁴³ Rendy A. Dinatingrat, *op.cit.*

⁴⁴ Daniel Dhakidae, "Sejarah Berakhir dan Sejarah Baru Berawal," *Prisma*, Vol. 36 (2017) 2.

juta orang Indonesia. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa para elit politik dan aparat negara semakin terbenam dalam oligarki dan gaya hidup mewah.

Saya berpikir bahwa kenyataan-kenyataan itu tak sekadar berbicara tentang ketimpangan ekonomi. Lebih jauh, fakta-fakta tersebut berbicara tentang moral meritokrasi yang congkak terutama keyakinan bahwa posisi sosial seseorang adalah harga yang pantas atas pencapaian individualnya. Dengan keyakinan ini, kita cenderung menafsir diri sebagai *competing individual*, bukan sebagai *public persona* yang memiliki kepekaan akan krisis dan penderitaan orang lain.⁴⁵ Keyakinan tersebut juga membuat kita gagal melihat ketimpangan struktural sebagai akar ketidaksetaraan. Karena itu, benar bahwa meritokrasi hanya fokus pada *mobility* (mobilitas), bukan *equality* (kesetaraan). Meritokrasi bahkan menyebarkan keyakinan bahwa “*inequality is not a failure of the system; it is a failure of you.*”⁴⁶ Di atas telah dibuktikan kekeliruan klaim ini. Tidak cukup kita beranggapan bahwa semua orang bisa sukses jika berbakat dan bekerja keras sebab perbedaan modal ekonomi, privilese kelas, dan sistem juga menentukan kesuksesan dan kegagalan seseorang. Ibarat meniti tangga, anak tangga yang dilewati orang-orang miskin terlampaui panjang dan banyak dibandingkan anak tangga yang dilewati orang-orang kaya.

Saya juga berpandangan bahwa meningkatnya paradigma meritokratis di Indonesia terkait dengan cara kita memahami individu. Seperti masyarakat liberal Barat, kita juga cenderung menafsir diri kita dalam kerangka meritokratis yaitu sebagai subjek ekonomi yang ditempa untuk berkompetisi di bursa pasar kerja dan mengejar kesuksesan individual. Ini membentuk individu-individu tanpa sikap sosial, humanitarian, solidaritas dan *compassion* terhadap kemanusiaan. Etika solidaritas hilang digusur etika meritokratis yang menekankan sukses individual. Hal ini melunturkan kepedulian etis terhadap *common good* sebagai proyek formatif politik. Absennya etika solidaritas membuat kita semua sebagai warga negara hanya mengikuti arus utama agar diri sendiri (bukan bangsa ini) selamat secara sosial, politik dan ekonomi.⁴⁷

Karena itu, meritokrasi adalah ancaman demokrasi. Meritokrasi dapat menghancurkan gagasan bangsa sebagai “*imagined political community*”, bangsa sebagai komunitas di mana kita, terlepas dari segala macam perbedaan, membayangkan diri terhubung dengan orang-orang lain yang tidak kita kenal. Menurut Benedict Anderson, bangsa adalah suatu *language game* baru yang ditemukan di nusantara beberapa abad lalu, dan merupakan metafora solidaritas. Meskipun kita tidak saling mengenal, kita terhubung satu sama lain sebab dalam pikiran kita tumbuh imajinasi dan citra sebuah komunitas bersama bernama bangsa Indonesia.⁴⁸ Citra itu hanya dapat tumbuh jika kita juga memahami diri sebagai bagian dari komunitas negara-bangsa, bukan individu *unencumbered self* belaka. Kesenjangan sosial yang makin besar antara orang kaya dan miskin, elit dan rakyat jelata, ketimpangan pembangunan di pusat dan daerah-daerah pelosok baik pembangunan SDM maupun infrastruktur, serta maraknya korupsi menunjukkan lunturnya *imagined political community* dan solidaritas sebagai satu bangsa. Di tengah

⁴⁵ Sandel, *The Tyranny*, *op.cit.*, 24.

⁴⁶ Sandel, *The Tyranny*, *op.cit.*, 101.

⁴⁷ Aris Arif Mundayat, “Mengembalikan Republik Melalui Populisme Pancasila: Mungkinkah?” *Demokrasi Tanpa Demos*, ed. Wijayanto, dkk (Jakarta: LP3ES, 2021) 574.

⁴⁸ Benedict Anderson, *Imagined Communities* (London: Verso, 2006), 6.

berbagai persoalan tersebut, kita perlu menghidupkan lagi imajinasi solidaritas sebagai satu bangsa melampaui seluruh etika kesuksesan individual.

Dapat dikatakan bahwa bahaya meritokrasi bagi demokrasi di Indonesia ialah meritokrasi mengabaikan konsepsi manusia sebagai makhluk sosial dan politis yang mencari pengakuan dan kebaikan bersama, bukan kekayaan, rasa puas diri, dan dominasi atas orang lain. Tujuan politik adalah asosiasi bebas warga negara untuk mewujudkan *common good* dilandasi kebajikan sosial bersama seperti kemurahan hati, kerendahan hati, pengakuan, rasa terima kasih, dan persaudaraan yang mengikat kita sebagai warga negara. Namun, prinsip meritokrasi yang merupakan wajah lain liberalisme dalam politik sekular menghancurkan kemungkinan hidup bersama dengan fokus pada hak-hak subjektif.⁴⁹

Maka amat penting gagasan Sandel bahwa untuk menghidupkan imajinasi solidaritas dan menyelamatkan demokrasi, kerendahan hati sangat dibutuhkan dalam politik. Kerendahan hati sebagai etika publik adalah pengakuan bahwa kita bukanlah individu atomistik yang asing dan sibuk dengan diri sendiri melainkan terhubung dengan orang lain dan komunitas serta bersama-sama berusaha mewujudkan kebaikan bersama. Karena itu, di balik segala pencapaian kita, kita berutang secara moral kepada masyarakat yang menghargai bakat-bakat kita. Implikasi konsep ini bagi demokrasi ialah bahwa kita tidak akan membenarkan ketimpangan sosial meskipun itu adalah hasil dari proses-proses ekonomi atau politik yang *fair* dan objektif, tetapi sebaliknya memperjuangkan kesetaraan yang lebih besar di antara manusia. Lebih daripada itu, konsep ini juga mematahkan klaim congkak meritokrasi bahwa para pemenang layak menghirup harum sukses mereka sepuas-puasnya dan bagi yang kalah tak ada yang perlu disalahkan selain diri sendiri. Kerendahan hati sebagai etika publik menyadarkan kita bahwa demokrasi dan politik perlu dibangun di atas empati dan solidaritas dengan penderitaan orang lain.

Kesimpulan

Meritokrasi merupakan sebuah ide revolusioner. Meritokrasi mewujudkan cita-cita kesetaraan dan karena itu, dianggap menopang demokrasi. Namun, benarkah demikian? Dengan memakai perspektif Sandel, penelitian ini telah menunjukkan bahwa meritokrasi juga merusak demokrasi karena fokusnya pada *mobility*, bukan *equality*. Meritokrasi tidak menghambat ketimpangan, tetapi mempertajamnya. Keyakinan meritokratis membuat ikatan sosial dan solidaritas menjadi tak pasti. Penelitian ini dianggap signifikan karena memperlihatkan faktor ideologis di balik ketimpangan sosial dalam masyarakat yang menjunjung tinggi prestasi individu. Karena itu, salah satu kontribusi utama riset ini adalah membongkar kesadaran palsu dan ilusi tentang kemajuan sosial yang dibangun di atas prinsip-prinsip meritokratis. Ideologi meritokrasi membelah masyarakat ke dalam kubu *the winners* dan *the losers*. Polarisasi semacam ini tidak sehat untuk demokrasi, karena demokrasi perlu ditopang oleh solidaritas sebagai fondasi moralnya. Keyakinan meritokratis tidak menampung konsep solidaritas. Dengan ini, riset ini juga berkontribusi dalam memperlihatkan akar-akar krisis demokrasi dan solidaritas di Indonesia. Atas dasar itu, riset ini menawarkan gagasan reimajinasi solidaritas yang sangat penting berhadapan dengan situasi bangsa Indonesia yang tengah diancam oleh polarisasi antara kelompok dan perpecahan karena konflik

⁴⁹ Adrian Pabst, "On the Convergence of Liberalism and Populism," *Telos*, Vol. 185 (Winter 2018) 203. doi:10.3817/1218185201.

kepentingan politik. Untuk mewujudkan gagasan reimajinasi solidaritas, penelitian ini menawarkan konsep kerendahan hati sebagai etika sosial. Rendah hati adalah pengakuan bahwa kita merupakan bagian dari komunitas dan masyarakat di mana kita hidup, dan bahwa bakat-bakat, prestasi dan pencapaian kita bukanlah hasil perbuatan kita sendiri belaka melainkan bergantung pada sumber daya sosial dan masyarakat yang menghargai bakat-bakat tersebut. Gagasan ini dapat menghidupkan kembali solidaritas, dan merupakan senjata melawan tirani meritokrasi.

Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan tersebut, penelitian ini menganjurkan perlunya perubahan cara pandang filosofis dan penataan sistem politik. Secara filosofis, kita perlu mengubah antropologi filosofis liberal tentang manusia. Sandel telah menunjukkan bahwa gagasan liberal tentang *unencumbered self* juga memiliki sisi gelap yaitu terciptanya individu-individu yang asing dan tercerabut dari dunia bersama. Antropologi filosofis liberal inilah fondasi konseptual etika meritokratis. Gagasan Sandel tentang perlunya pribadi dijangkarkan kembali pada nilai-nilai bersama dan tujuan sosial sangat penting diperhatikan di tengah krisis demokrasi akibat polarisasi yang berakar pada konflik kepentingan dewasa ini di Indonesia. Dialektika antara konsep diri liberal dan konsep diri komunitarian secara filosofis harus terus diperdebatkan. Secara politis, para elit politik dan pemerintah perlu menanggapi secara serius keluhan moral terhadap ketimpangan sosial ekonomi, kemarahan terhadap oligarki, dan murka terhadap hegemoni neo-liberal, sebagai keluhan moral yang sah. Sistem politik dianjurkan untuk lebih terbuka terhadap diskursus moral publik yang luas, dan sedapat mungkin mencegah dominasi elit atau mereka yang dianggap ahli dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk mengekspresikan kerendahan hati dan solidaritas sebagai etika publik, sistem politik juga perlu menghidupkan kembali konsep tentang pekerjaan manusia sebagai sumber harga diri dan pengakuan sosial, sehingga para buruh dan mereka yang tidak memiliki ijazah sarjana memiliki tempat dan penopang dalam masyarakat. Sandel menyebut politik semacam ini sebagai politik progresif, politik yang memperjuangkan nasib orang-orang miskin dan tertindas secara konsisten. Politik progresif ini makin hilang ditelan dominasi oligarki dan neo-liberalisme di Indonesia. Maka, riset ini mendorong agar politik progresif ini dihidupkan kembali bukan saja oleh pemerintah, politisi, atau partai, melainkan terutama oleh gerakan masyarakat warga yang independen, kritis, dan bebas.

Daftar Rujukan

Anderson, Benedict. *Imagined Communities*. London: Verso, 2006.

Baker, Edwin. "Sandel on Rawls." *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 133, 1985.

Dhakidae, Daniel. "Sejarah Berakhir dan Sejarah Baru Berawal." *Prisma*, Vol. 36, 2017.

- Hall, Terry. "Beyond the Procedural Republic: The Communitarian Liberalism of Michael Sandel." In *An Introduction to Contemporary Liberal Political Theory and Its Critics*, edited by Christopher Wolfe. USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.
- Harari, Yuval N. *Homo Sapiens*, penerj. Damarying Tyas. Jakarta: KPG, 2011.
- Kant, I. *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*. Edited by Pauline Kleingeld. London: Yale University Press, 2006.
- Kleden, Ignas. "Nasionalisme Mencari Demokrasi." *Tempo, Merawat Indonesia*, Agustus 2005.
- Kompas. "Orang tua Indonesia Makin Sulit Biayai Kuliah Anak," 27/8/2022, hlm. 1
- Madung, Otto Gusti, "Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel." *Jurnal Ledalero*, Vol. 9, No. 2, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.212.127-14>.
- Muelen. "Solidarity, Justice and Recognition of the Other." *Theor Med Bioeth*, Vol. 37, 2016. DOI 10.1007/s11017-016-9387-3.
- Mundayat, Aris Arif. "Mengembalikan Republik Melalui Populisme Pancasila: Mungkinkah?" *Demokrasi Tanpa Demos*, ed. Wijayanto, dkk. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Osno, E. "China's Encounter with Michael Sandel." *Encountering China. Michael Sandel and Chinese Philosophy*, ed. M. Sandel and Paul J. D'Ambrosio. Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
- Pabst, Adrian. "On the Convergence of Liberalism and Populism." *Telos*, Vol. 185, 2018. doi:10.3817/1218185201.
- Prasetyo, Galih. "Buntut Pidato Megawati Soekarnoputri, Tukang Bakso Jadi Trending Topic." <https://bogor.suara.com/read/2022/06/23/100643/buntut-pidato-megawati-soekarnoputri-tukang-bakso-jadi-trending-topic-publik-terima-kasih-telah-menghina>.
- Rawls, J. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, 2009.
- Rorty, Richard. *Contingency, Irony and Solidarity*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Rosenbaum, Stuart. *Race, Justice and American Intellectual Traditions*. USA: Palgrave Pivot, 2018.
- Sandel, Michael. *Liberalism and The Limit of Justice*, Second Edition. USA: Cambridge University Press, 1998.
- *Democracy's Discontent*. Massachusetts: Harvard University Press, 1996.
- "The Procedural Republic and The Unencumbered Self," *Political Theory*, Vol. 12, No. 1, 1984. <http://links.jstor.org/sici?sici=0090-5917%28198402%2912%3A1%3C81%3ATPRATU%3E2.0.CO%3B2-X>.
- *Justice What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010.
- *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* USA: Farrar, Straus and Giroux, 2020.

----- "Populism, Liberalism and Democracy." *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 44(4), 2018. <https://doi.org/10.1177/0191453718757888>.

----- "How to Save Democracy." *NEW STATESMAN*, 18-24 May 2018.

----- "A New Politics of the Common Good." <http://asanints.org>.

Wooldridge, Alan. *The Aritocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World*. USA: Penguin Books, 2021.

Young, Michael. *The Rise of Meritocracy 1870-2033, An Essay on Education and Equality*. London: Penguin Books, 1961.